



PEMERINTAH

KABUPATEN PASURUAN

RENSTRA 2024-2026



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana jangka menengah periode tiga tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan dalam ruang lingkup Tupoksi OPD. RENSTRA diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama tiga tahun.

Renstra ini tidak begitu bermakna tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan strategis yang efisien dan efektif dilandasi komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan pedoman jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan Rencana Pembangunan Daerah bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :

1. Apa yang akan dicapai oleh OPD dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Bagaimana cara mencapainya.
3. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Kami menyadari Renstra ini mungkin masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun harus mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 khususnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam berupaya mewujudkan tujuan dan sasarannya.

Pasuruan, 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PASURUAN



Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196602140986021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	12
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendataan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.....	13
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.....	13
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset.....	14
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Anggaran dan Belanja.....	15
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Akuntansi	15
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT).....	16
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah	18
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	18
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	23
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	29
3.1 Permasalahan pelayanan PD	29
3.2 Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
4.2 Cascading.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
7.1 Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026	83
7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci	84
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	18
Tabel 2.2 Kebutuhan Pegawai Badan Pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	18
Tabel 2.3 Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)	23
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	275
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	27
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	32
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	32
Tabel 3.3 Isu Strategis dan Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten pasuruan	32
Tabe 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat	37
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	583
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	58
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	839
Tabel 7.2 Proyeksi Target Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	17
Gambar 4.1 <i>Logical Framework</i> Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	38
Gambar 4.2 <i>Cascading</i> Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Renstra BPKPD Tahun 2024 - 2026 bersifat khusus karena disusun pada masa tidak adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum sehingga tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan visi misi Bupati terpilih. Renstra BPKPD Tahun 2024 - 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. RPD Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra BPKPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan BPKPD, acuan dalam pembuatan renja BPKPD, menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 3 tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan urusan keuangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Permendagri Nomor 52 Tahun 2022, tentang penyusunan Dokumen RPD
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2016;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
29. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang digambarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait pencapaian sasaran RPD meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang harus dilaksanakan oleh BPKPD pada periode 2024 - 2026.

Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024-2026, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu periode Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur BPKPD
- 2.2 Sumber Daya BPKPD
- 2.3 Kinerja pelayanan BPKPD
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 memuat:

- 3.1 Permasalahan pelayanan PD
- 3.2 Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 memuat:

4.1 Tujuan dan sasaran Rensta PD tahun 2024-2026; dan

4.2 Cascading kinerja PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagu BPKPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 memuat:

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah tahun 2024-2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang keuangan dan pendapatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan meyelenggaraan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
1. Subbidang Penagihan dan Keberatan;
 2. Subbidang Pengembangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Anggaran dan Belanja, Membawahi :
1. Subbidang Anggaran;
 2. Subbidang Perbendaharaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Akuntansi, Membawahi :
1. Subbidang Bina dan Fasilitas Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;

- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendataan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Bidang Pendapataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pendapataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan Bidang pendataan, Penetapan dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, serta Pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan peremajaan data dan informasi pajak daerah;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan..

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan Fungsi bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian, Penagihan, Keberatan, Pengembangan dan Pembinaan, terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. penyusunan perencanaan pendapatan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- e. pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. perumusan dan penyusunan Peraturan Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan Kajian dan identifikasi potensi Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan peraturan Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keberatan wajib pajak; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan, perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;
- b. pelaksanaan penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari Perangkat Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah ke dalam daftar barang pengelola;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas Barang Milik Daerah pada daftar barang pengelola;
- g. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang telah diserahkan;
- h. pelaksanaan penghimpunan daftar hasil pemeliharaan Perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah Triwulan dan Tahunan;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan teknik dan monev di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Pelaksanaan Penilaian BMD,
- n. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD;

- o. Pelaksanaan penyusunan satuan standart harga (SSH);
- p. Pelaksanaan penyusunan standar BMD dan standar Kebutuhan BMD;
- q. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD
- r. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Anggaran dan Belanja

Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Anggaran dan Belanja untuk acuan pelaksanaan fungsi;
- b. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis APBD;
- d. pengendalian penyusunan anggaran dan;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan bina dan fasilitasi akuntansi, pelaporan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang akuntansi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Akuntansi untuk acuan pelaksanaan fungsi;
- b. pelaksanaan bina dan fasilitasi akuntansi, pelaporan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- f. pelaksanaan penyusunan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. pelaksanaan fasilitasi akuntansi Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT)

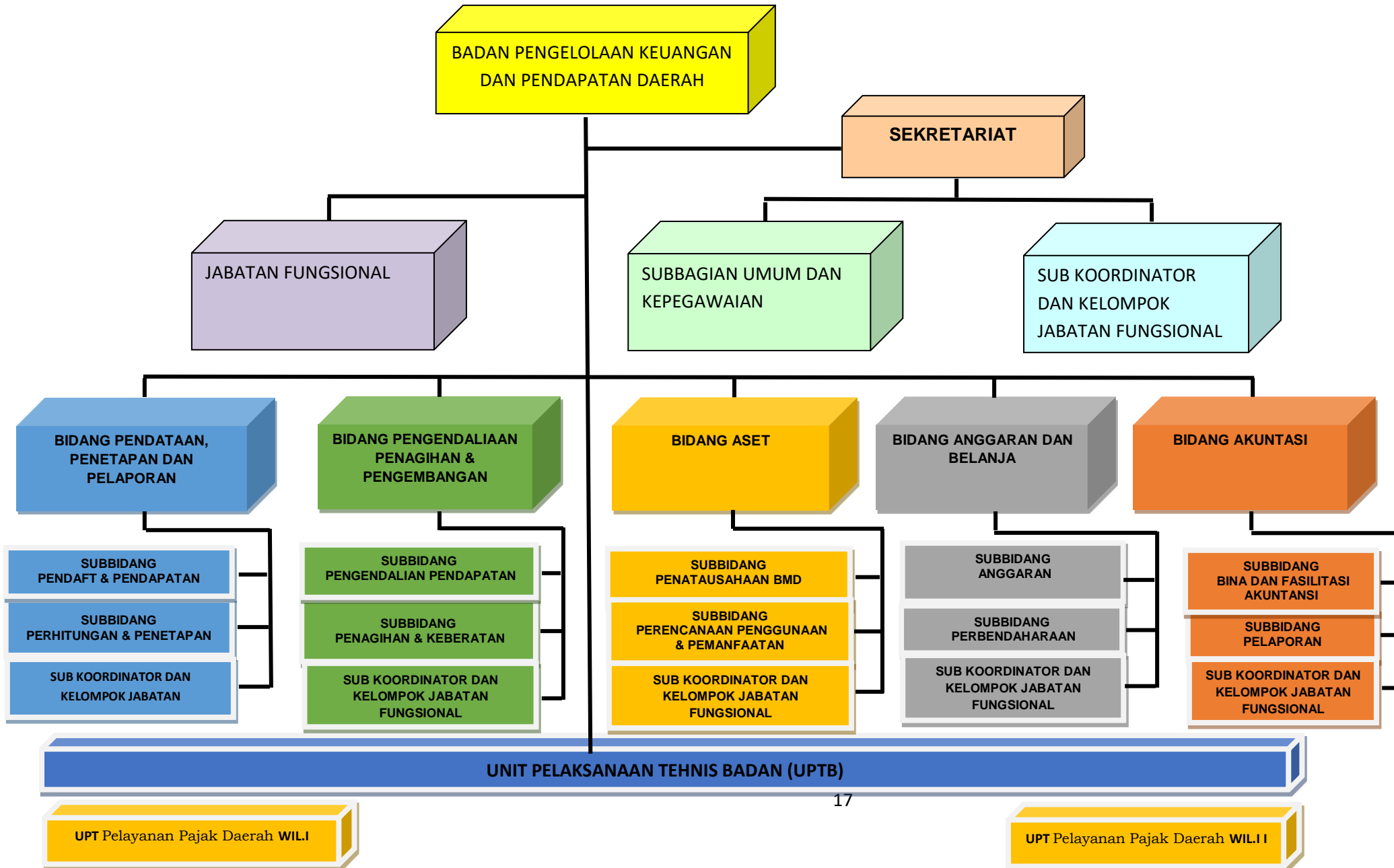
Unit Pelaksanaan Tehnis Badan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai tugas tehnis operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam melaksanakan tugas dimaksud Unit Pelaksanaan Tehnis Badan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
- b. melaksanakan Pendataan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame;
- c. melaksanakan penagihan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame, Pajak Penerangan jalan non PLN;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian SPPT-PBB P2 ketetapan diatas 500 ribu dan SPTPD/Nota perhitungan pajak daerah lainnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 188 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten pasuruan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Dengan terbitnya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 maka Program, kegiatan maupun sub Kegiatan indikator mengalami Perubahan.

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN



2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai struktur organisasi terdiri dari 5 (lima) bidang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 157 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pegelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan												
Jenis kelamin		Golongan				Esselon			Pendidikan			
L	P	I	II	III	IV	2	3	4	SLTA	D3	S1	S2
88	69		33	56	7	1	5	13	43	22	66	23

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari pegawai dengan posisi dan jabatan yang diampunya. Kondisi kebutuhan pegawai BPKPD tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2 Kebutuhan Pegawai Badan Pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No.	Nama Bidang	Nama Jabatan	Bezzeting Saat ini	Kebutuhan Pegawai	+/-
1		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	1	0

2	Sekretariat	Sekretaris	1	1	0
3	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Sekretariat	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	1	0
5	Sekretariat	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	-1
6	Sekretariat	Pengadministrasi Persuratan	1	1	0
7	Sekretariat	Pengadministrasi Umum	2	2	0
8	Sekretariat	Pengemudi		1	-1
9	Sekretariat	Petugas Keamanan		3	-3
10	Sekretariat	Bendahara	2	2	0
11	Sekretariat	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan		2	-2
12	Sekretariat	Penyusun Laporan Keuangan		2	-2
13	Sekretariat	Pengevaluasi Program dan Kinerja	1	1	0
14	Sekretariat	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
15	Sekretariat	Verifikator Keuangan	1	1	0
16	Sekretariat	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	0
17	Sekretariat	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
18	Sekretariat	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	-1
19	Sekretariat	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	1	1	0
20	Sekretariat	Pengelola Akuntansi	1	1	0
21	Sekretariat	Perencana Muda	1	1	0
22	Sekretariat	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1	0
23	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	1	1	0
24	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan	1	1	0
25	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Analisis Survey, Pengukuran, dan Pemetaan		2	-2
26	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Analisis Pajak Daerah	1	1	0
27	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengelola PBB P2 dan BPHTB		4	-4
28	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengelola Data Pengukuran dan Pemetaan		3	-3
29	Bidang Pendataan, Penetapan dan	Pengelola Data dan Potensi Pajak	3	4	-1

	Pelaporan Pendapatan Daerah				
30	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan	1	1	0
31	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Analisis Pajak Daerah	1	1	0
32	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Analisis Penagihan dan Pengembalian		1	-1
33	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	5	-4
34	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengelola PBB-P2 Dan BPHTB	2	3	-1
35	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengolah Pajak Daerah	2	2	0
36	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengelola Data Rekonsiliasi	2	2	0
37	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Pengadministrasi Pajak		1	-1
38	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1	1	0
39	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan	1	1	0
40	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Analisis Pajak Daerah		1	-1
41	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Analisis Penagihan dan Pengembalian	1	1	0
42	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak		5	-5
43	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengolah Data Penagihan Pajak	4	5	-1
44	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengelola PBB-P2 Dan BPHTB		2	-2

45	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengolah Pajak Daerah	1	2	-1
46	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengadministrasi Pajak		2	-2
47	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bidang Pengembangan	1	1	0
48	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Analisis Penagihan Pajak		1	-1
49	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengolah Pajak Daerah	1	2	-1
50	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2	2	0
51	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	2	5	-3
52	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengolah Data Penagihan Pajak		2	-2
53	Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pengadministrasi Pajak		2	-2
54	Bidang Aset	Kepala Bidang Aset	1	1	0
55	Bidang Aset	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	0
56	Bidang Aset	Analisis Barang Milik Negara	1	2	-1
57	Bidang Aset	Analisis Sistem Informasi		2	-2
58	Bidang Aset	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang		2	-2
59	Bidang Aset	Pengelola Barang Milik Negara		3	-3
60	Bidang Aset	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana		1	-1
61	Bidang Aset	Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	1	1	0
62	Bidang Aset	Analisis Aset Daerah		2	-2
63	Bidang Aset	Analisis Barang Milik Negara		3	-3
64	Bidang Aset	Kustodian Barang Milik Negara	2	2	0

65	Bidang Aset	Pengelola Barang Milik Negara	1	3	-2
66	Bidang Aset	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	3	-1
67	Bidang Anggaran dan Belanja	Kepala Bidang Anggaran dan Belanja	1	1	0
68	Bidang Anggaran dan Belanja	Kepala Sub Bidang Anggaran	1	1	0
69	Bidang Anggaran dan Belanja	Pemeriksa Anggaran		1	-1
70	Bidang Anggaran dan Belanja	Analisis Perencanaan Anggaran	2	2	0
71	Bidang Anggaran dan Belanja	Analisis Standar Harga		2	-2
72	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengolah Data Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	1	1	0
73	Bidang Anggaran dan Belanja	Verifikator Anggaran	1	1	0
74	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengadministrasi Anggaran		1	-1
75	Bidang Anggaran dan Belanja	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	1	1	0
76	Bidang Anggaran dan Belanja	Analisis Perbendaharaan	3	3	0
77	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengolah Data Laporan Kas	1	1	0
78	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengelola Pembiayaan Daerah	1	2	-1
79	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	3	3	0
80	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengadministrasi Keuangan	2	3	-1
81	Bidang Anggaran dan Belanja	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1	2	-1
82	Bidang Anggaran dan Belanja	Analisis Keuangan	1	1	0
83	Bidang Anggaran dan Belanja	Pengolah Data Perbendaharaan		2	-2
84	Bidang Akuntansi	Kepala Bidang Akuntansi	1	1	0
85	Bidang Akuntansi	Kepala Sub Bidang Bina dan Fasilitas Akuntansi	1	1	0
86	Bidang Akuntansi	Analisis Laporan Keuangan	1	1	0
87	Bidang Akuntansi	Pengelola Akuntansi	1	1	0
88	Bidang Akuntansi	Analisis Transaksi Keuangan		1	-1
89	Bidang Akuntansi	Kepala Sub Bidang Pelaporan	1	1	0
90	Bidang Akuntansi	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0
91	Bidang Akuntansi	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah		1	-1
92	Bidang Akuntansi	Analisis Laporan Keuangan	1	2	-1
93	UPT Pelayanan Pajak Daerah	Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I	1	1	0
94	UPT Pelayanan Pajak Daerah	Pengelola Pajak Daerah	1	3	-2
95	UPT Pelayanan Pajak Daerah	Pengadministrasi Pajak	1	3	-2

96	UPT Pelayanan Pajak Daerah	Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Ii	1	1	0
97	UPT Pelayanan Pajak Daerah	Pengelola Pajak Daerah		3	-3
98	UPT Pelayanan Pajak Daerah	Pengadministrasi Pajak	2	3	-1
99		Perencana Pertama		1	-1
100		Perencana Muda		1	-1
101		Perencana Madya		1	-1
102		Perencana Utama		1	-1
103		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama		2	-2
104		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya		6	-6
105		Analisis Anggaran Ahli Pertama		2	-2
106		Analisis Anggaran Ahli Muda			0

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)

No	KATEGORI ASET	KODE BARANG	NILAI
	TANAH	01.03.01.01	1.270.007.076.579
	TANAH	01.03.01	1.270.007.076.579
	ALAT BESAR	01.03.02.01	37.303.537.754
	ALAT ANGKUTAN	01.03.02.02	229.377.211.207
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	01.03.02.03	36.078.090.343
	ALAT PERTANIAN	01.03.02.04	9.586.605.952
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	01.03.02.05	416.824.860.990
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	01.03.02.06	63.329.823.870
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	01.03.02.07	409.301.327.685
	ALAT LABORATORIUM	01.03.02.08	88.281.665.257
	ALAT PERSENJATAAN	01.03.02.09	946.055.958
	KOMPUTER	01.03.02.10	249.542.137.902
	ALAT EKSPLORASI	01.03.02.11	7.985.000
	ALAT PENGEBORAN	01.03.02.12	-
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	01.03.02.13	134.734.000
	ALAT BANTU EKSPLORASI	01.03.02.14	-
	ALAT KESELAMATAN KERJA	01.03.02.15	442.238.920
	ALAT PERAGA	01.03.02.16	139.203.600
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	01.03.02.17	266.069.798
	RAMBU - RAMBU	01.03.02.18	28.370.158.683
	PERALATAN OLAH RAGA	01.03.02.19	1.654.181.176

PERALATAN DAN MESIN	01.03.02	1.571.585.888.094
BANGUNAN GEDUNG	01.03.03.01	2.118.889.351.333
MONUMEN	01.03.03.02	1.187.877.388
BANGUNAN MENARA	01.03.03.03	149.623.000
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	01.03.03.04	33.142.021.086
GEDUNG DAN BANGUNAN	01.03.03	2.153.368.872.807
JALAN DAN JEMBATAN	01.03.04.01	1.770.069.303.959
BANGUNAN AIR	01.03.04.02	495.727.426.022
INSTALASI	01.03.04.03	60.395.046.342
JARINGAN	01.03.04.04	126.225.781.236
JARINGAN	01.03.04	2.452.417.557.558
BAHAN PERPUSTAKAAN	01.03.05.01	61.168.854.601
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAG A	01.03.05.02	5.277.479.061
HEWAN	01.03.05.03	141.271.125
BIOTA PERAIRAN	01.03.05.04	-
TANAMAN	01.03.05.05	859.385.415
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	01.03.05.06	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	01.03.05.07	-
ASET TETAP LAINNYA	01.03.05	67.446.990.202
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	01.03.06.01	8.085.235.611
KDP	01.03.06	8.085.235.611
ASET TIDAK BERWUJUD	01.05.03.01	4.788.061.286
ASET TIDAK BERWUJUD	01.05.03	4.788.061.286
ASET LAIN-LAIN	01.05.04.01	75.823.984.859
ASET LAIN-LAIN	01.05.04	75.823.984.859
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	01.05.05.02	-
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD ()	01.05.05	-
TOTAL	-	7.603.523.666.996

*Data sementara

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD / P.APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD			100 %	100 %	100 %				100 %	100 %	100 %				100%	100 %	100 %			
2.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			8%	8%	8%				- 19,17 %	5,96	7,56				-2,39%	74,5%	94,5%			
3.	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart akuntansi Pemerintahan				100%	100%					100%	100%					100%	100%			
4.	Laporan Keuangan dengan OPINI BPK	WTP	WTP				WTP	WTP	WTP				WTP	WTP					WTP	WTP	
5.	Nilai Sakip	83	83				81	82	83				81.02	82.87					1,0002	1,01	

2.3 Kinerja Pelayanan BPKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Indikator Kinerja Utama yang dimiliki oleh BPKPD mengalami perubahan di tahun 2021. Mulai tahun 2021 Indikator sasaran utama BPKPD adalah nilai SAKIP dan Laporan Keuangan dengan Opini BPK. Adapun Indikator Kinerja sebelumnya (2018-2020) meliputi:

1. Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD / P.APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD

Dari Tabel 2.2, dapat diketahui pada indikator Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD / P.APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD pada Badan Keuangan Daerah menghasilkan capaian kinerja 100% atau sangat berhasil.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian PAD di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

- a) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Pendapatan Dana BOS pada RKA-SKPD dianggarkan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Hibah Dana Bos yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud diselenggarakan pada SKPKD, Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan yang sah.
- b) Terjadi penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Rp. 110 M pada tahun 2017 menjadi Rp. 68 M pada tahun 2018 atau terdapat penurunan sebesar Rp. 42 M. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 terjadi peralihan kepemilikan Pabrik

Gudang Garam yang berdampak pada penerimaan BPHTB. Penurunan BPHTP dikarenakan transaksi jual beli tanah dan bangunan berkurang disebabkan antara lain belum ditetapkannya PERDA RDTR di beberapa kecamatan, sehingga calon pembeli belum berani berspekulasi melakukan pembelian karena belum tentu sesuai dengan peruntukan yang diinginkan.

Di tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan menjadi 5,96%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga terjadi kembali di tahun 2020, dari nilai 5,96% menjadi 7,56%.

3. Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Dari Tabel 2.2, dapat diketahui pada indikator Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah menghasilkan capaian kinerja 100%. Hal ini diperkuat dengan penilaian BPK RI berupa opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas LKPD tahun 2019, 2020 dan tahun sebelumnya.

4. Laporan Keuangan dengan OPINI BPK

Dari Tabel 2.2, dapat diketahui pada indikator Laporan Keuangan dengan Opini BPK, hasil atas LKPD Kabupaten Pasuruan sampai dengan 2022 telah 9 (Sembilan) kali memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

5. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP yang didapat oleh BPKPD terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Di tahun 2020, BPKPD mendapat predikat “Sangat Baik” atas capaian SAKIP. Di tahun 2021 nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 81,02 dan di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 82,87.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Capaian Kinerja

Laporan Keuangan dengan opini WTP

- a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja instansi.
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan

jenjang pendidikan.

- c. Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta instansi vertikal lainnya.
- e. Peningkatan Koordinasi Rekonsiliasi antar Perangkat Daerah.
- f. Adanya Sosialisasi dan Koordinasi secara Intens.
- g. Adanya Evaluasi pengukuran Kinerja dan anggaran secara berkala.
- h. Menyeleraskan, Menyusun dan Mengevaluasi Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran.
- i. Mengevaluasi pelaporan Kinerja secara berkala.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pajak Daerah

1. Data Wajib Pajak tidak akurat.
2. Kurangnya perbaruan peraturan mengenai pajak dan retribusi.
3. Wajib pajak Tidak Patuh.
4. Peralatan kurang canggih.
5. SDM kurang memadai.
6. Kurangnya Koordinasi, Sosialisasi, dan sarana Prasarana yang kurang memadai.
7. Data objek pajak belum berbasis spasial sehingga dievaluasi NjOP membutuhkan waktu yang lebih lama

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan (T-C.24)

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.191.562.663,00	2.370327732	2150698501	111.458.246.827,00	159.015.609.029	755335847039	1.140.918.573,00	2303821805	1913537933	104.098.488.474,00	97.737.958.688		95%	97%	88%	93,3%	61,64%	0	128923421363.80	24149260029
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.842.632.660,10	12668943460	5653051105	685.043.623.408,00	657.267.185.631	664654079796	12.249.545.974,00	12309599825	5385442170	674.999.025.058,00	636.548.309.851		95,3%	97,1%	95,2%	98%	96,85%	0	130362289427.18	156074690969.25
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1470372186	1.914.392.198	4.332.118.970	3950350473	-		1085994317	1.874.221.779	3.675.008.797				73,8%	97,7%	84,83%	0	826659429.00	1294507240
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-		6981152912	5.942.699.574	9.464.014.910	11932489859	-		6455949300	5.748.050.614	8.826.613.974				92,4%	96,7%	93,27%	0	1650445649	1185332337

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran BPKPD meliputi wajib pajak daerah, Perangkat daerah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat. Program pengelolaan pendapatan daerah yang diampu oleh bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (P3) serta bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan (P4) bersinggungan langsung dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, wajib pajak serta kecamatan. Dalam melakukan tugasnya terkait retribusi, bidang P3 dan P4 berkoordinasi dengan OPD penghasil yang menghimpun retribusi.

Program pengelolaan keuangan daerah pada BPKPD yang diampu oleh bidang akuntansi serta bidang anggaran dan belanja, tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya koordinasi dengan beberapa instansi. Untuk mencapai ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran sehingga BPKPD berkerjasama dengan PDAM, BPR. Mina Mandiri, PT. Jalan Tol, KPPN Malang, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT. Taspen, KPP Pratama serta 55 OPD Kabupaten Pasuruan. Untuk mencapai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BPKPD, BPKPD juga berkoordinasi dengan TAPD, 55 OPD Kabupaten Pasuruan serta Bank Jatim. Sejalan dengan tujuan dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPK.

Program pengelolaan Barang Milik Daerah, diampu oleh bidang Aset di BPKPD. Dalam mencapai tujuan bidang tersebut, Bidang Aset melakukan koordinasi dengan 56 OPD Kabupaten Pasuruan terkait pengelolaan aset yang dilakukan oleh keseluruhan OPD tersebut. Selain itu, dalam hal persertifikatan tanah, untuk percepatan persertifikatan tanah, bidang aset juga berkoordinasi serta membuat MOU dengan Badan Pertanahan Nasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan pelayanan PD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. BPKPD memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal

a. Kekuatan

- 1) Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah OPD yang memiliki kewenangan sebagai SKPKD;
- 2) Komitmen kepala Badan yang kuat untuk membenah manajemen Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- 3) Integritas dan loyalitas pegawai Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
 - 4) Komitmen kerja yang kuat untuk mencapai target;
 - 5) Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
 - 6) E-payment memudahkan dalam pembayaran pajak;
 - 7) Pengelolaan keuangan berbasis web
- b. Kelemahan
- 1) Penggunaan 2 Aplikasi pengelolaan keuangan yang tidak efisien.
 - 2) Penyerapan anggaran rendah di Semester I;
 - 3) Kurangnya SDM yang kompeten;
 - 4) Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak;
 - 5) Penerimaan Pendapatan Daerah yang sering berfluktuasi.
 - 6) Pemanfaatan BMD belum maksimal;
 - 7) Kurangnya perbaruan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah;
 - 8) Banyak BMD yang belum bersertifikat.
2. Faktor Eksternal
- a. Peluang
- 1) Adanya otonomi daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Berkembangnya Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Adanya Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan sedang tinggi, sehingga berpotensi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
 - 5) Banyaknya aset yang berpeluang untuk berkontribusi dalam peningkatan PAD.
- b. Tantangan
- 1) Adanya tuntutan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Meningkatnya Standar Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Adanya E-Audit dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Dana transfer cenderung menurun;
 - 5) Peraturan – peraturan yang sering berubah – ubah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Perlu pemetaan terhadap kebutuhan Tenaga ahli, Pengadaan pelatihan dan sosialisasi.
2	Belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah	Kurangnya Tenaga Ahli IT Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi
4	Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (<i>Fiscus</i>) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah	Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (<i>Fiscus</i>) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base.
5	Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada	SDM yang tidak mengerti tentang Pajak daerah .
6	Atribut aset barang kurang lengkap	Kurang memahi terhadap pengelolaan Aset BMD.
7	Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat	Anggaran Masih belum optimal serta Koordinasi rendah .
8	Aset Tanah belum terpetakan	Rendahnya tata tertib administrasi aset
9	Proses pengelolaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi yang berbeda sehingga harus ada data yang diintegrasikan	Adanya kewajiban pusat dalam penggunaan SIPD namun belum dapat digunakan secara maksimal
10	Kurangnya peningkatan sosialisasi dan koordinasi terkait pajak daerah	Kurangnya Sumber Daya Manusia
11	Penerimaan dari Pajak Daerah belum optimal.	Penetapan tarif pajak daerah dibawah batas maksimal yang diperkenankan oleh undang-undang
12	Kurangnya pengawasan dan Pengendalian Wajib Pajak	Tidak patuhnya Wajib pajak

No.	Masalah	Akar Masalah
13	Peningkatan Sosialisasi terkait pemabayaran Pajak Daerah	Wajib Pajak masih belum memahami atas pembayaran Pajak Daerah
14	Update data NjOP membutuhkan waktu lama	Data Objek pajak belum berbasis spasial yang dapat dievaluasi riil time sesuai perkembangan infrastruktur dan kewilayahan

Tabel T-B 35 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Program BPKPD Kabupaten Pasuruan	Permasalahan	Faktor pendukung	Faktor penghambat
1	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan SDM melalui Bimtek-Bimtek	Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (<i>Fiscus</i>) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base.
		Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal	Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru	Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur
		Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai	Mengadakan Sosialisasi – penyebluasan pajak Daerah	Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai

No	Program BPKPD Kabupaten Pasuruan	Permasalahan	Faktor pendukung	Faktor penghambat
		dengan potensi yang ada.		dengan potensi yang ada.
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain PAD yang sah .	Penerimaan PJU yang cenderung stagnan	Jumlah Aset daerah yang cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar	Perlu peningkatan sosialisasi dan Koordinasi dengan Bidang terkait
3	Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah di setiap UPT BPKPD	Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan PAD dan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat	Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait terbangun baik	Perbandingan luas wilayah dan medan operasional dengan sarpras penunjang masih belum memadai
4	Program Pelayanan Kesekretariatan BPKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Pemenuhan Bimtek-Sosialisai SAKIP	Kurangnya Antusias Terhadap SAKIP
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Atribut aset barang kurang lengkap	Koordinasi Rapat-rapat terkait dengan OPD	Perangkat Daerah belum maksimal melaporkan Atribut aset barang dengan baik.
		Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat	MOU dengan BPN	Peningkatan Koordinasi dengan Pihak BPD dan OPD terkait
			Membentuk tim teknis antara BPN dengan pemda (BPKPD, opd pengampuh, camat, kades, kakel yang ada asetnya PEMDA).	

No	Program BPKPD Kabupaten Pasuruan	Permasalahan	Faktor pendukung	Faktor penghambat
		Aset banyak yang belum diasuransikan	Membentuk tim teknis dengan OPD terkait	Peningkatan Koordinasi dengan OPD terkait
6	Program Pengelolaan Keuangan daerah	Proses pengelolaan keuangan masih terkendala oleh Sistem informasi dan Tekhnologi (e-Budgeting) yang belum terintegrasi dengan Penatausahaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan	Aplikasi SIPD sudah dilaksanakan namun terpisah dengan Aplikasi Penatausahaan SIMDA	Masih Belum ada Kesiapan dari pusat dan tindaklanjut Dari Pusat
		Penyertaan Modal masih belum maksimal.	Pendampingan Investasi	Kurangnya dana penyertaan Modal Daerah.
		banyak nya peraturan dari Pusat terkait Covid 19 sehingga banyak pergeseran anggaran sebelum perubahan Anggaran.	Peningkatan Intens Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD	mengakibatkan angka belanja berubah-ubah, pada perangkat Daerah yang harus menyesuaikan rekening belanja

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Tabel 3.3 Isu Strategis dan Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten pasuruan

	Isu strategis	Strategi
Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah serta masih kurangnya pengawasan dan pengendalian pajak	Meningkatkan SDM Pemungut Pajak;	Peningkatan pelatihan SDM pemungut pajak
Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah	Melaksanakan tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;	Peningkatan sistem dan kompetensi sumber daya manusia
Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (<i>Fiscus</i>) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah	Meningkatkan SDM Pemungut Pajak;	Peningkatan pelatihan SDM pemungut pajak
Atribut aset barang kurang lengkap	Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah secara optimal;	Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait
Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat dan terpetakan	Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah secara optimal;	- Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait - pengoptimalan pemanfaatan aset sehingga dapat

	Isu strategis	Strategi
		berkontribusi lebih banyak terhadap PAD
Penggunaan 2 aplikasi pada pengelolaan keuangan	Proses pengelolaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi yang berbeda sehingga pada penganggaran dan penatausahaan masih terdapat data yang harus diintegrasikan	Melakukan sinkronisasi data secara akurat untuk hasil pelaporan yang akuntabel

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Di dalam tujuan tersebut, BPKPD meegang tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, manajemen aset serta pengelolaan pendapatan daerah. Indikator tujuan dari meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Aset serta Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

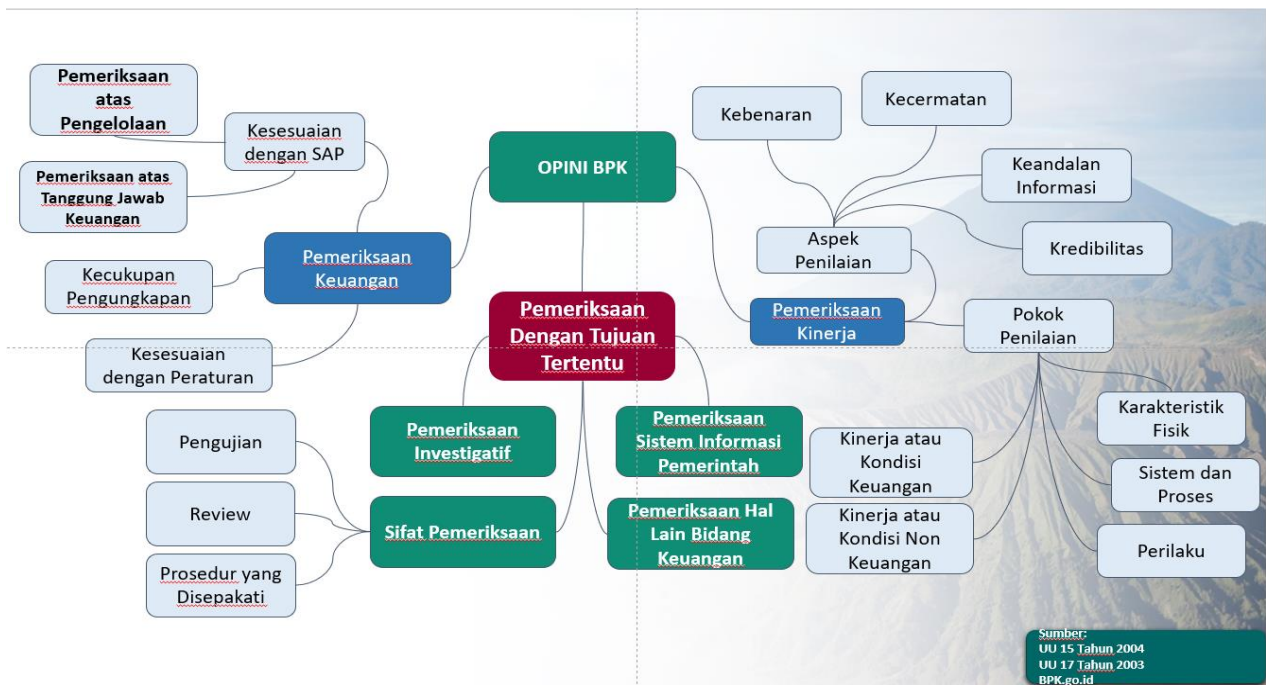
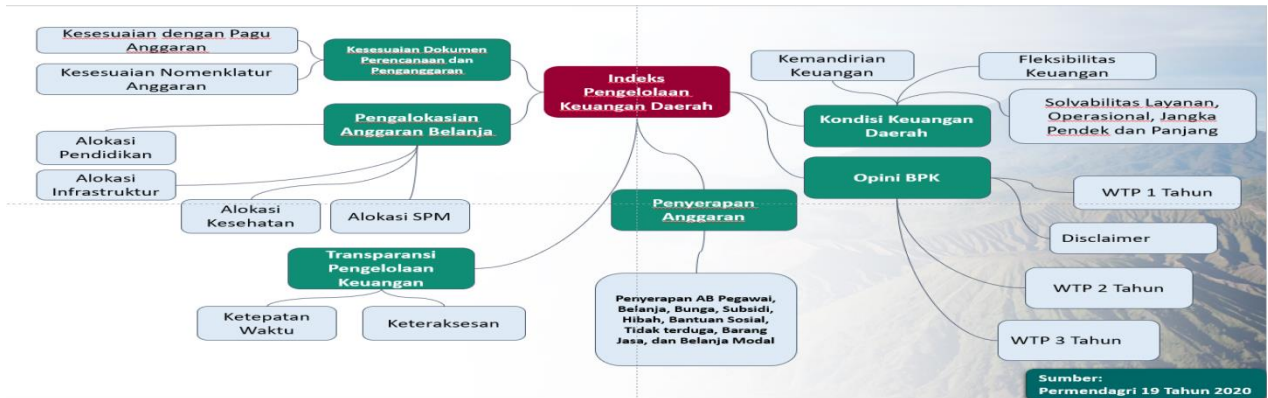
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD BPKPD

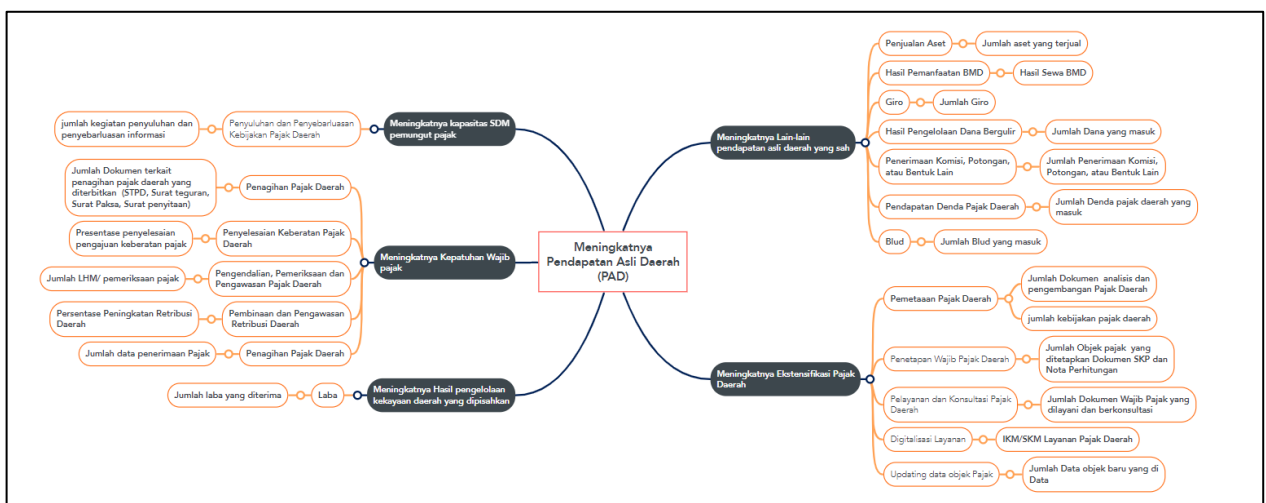
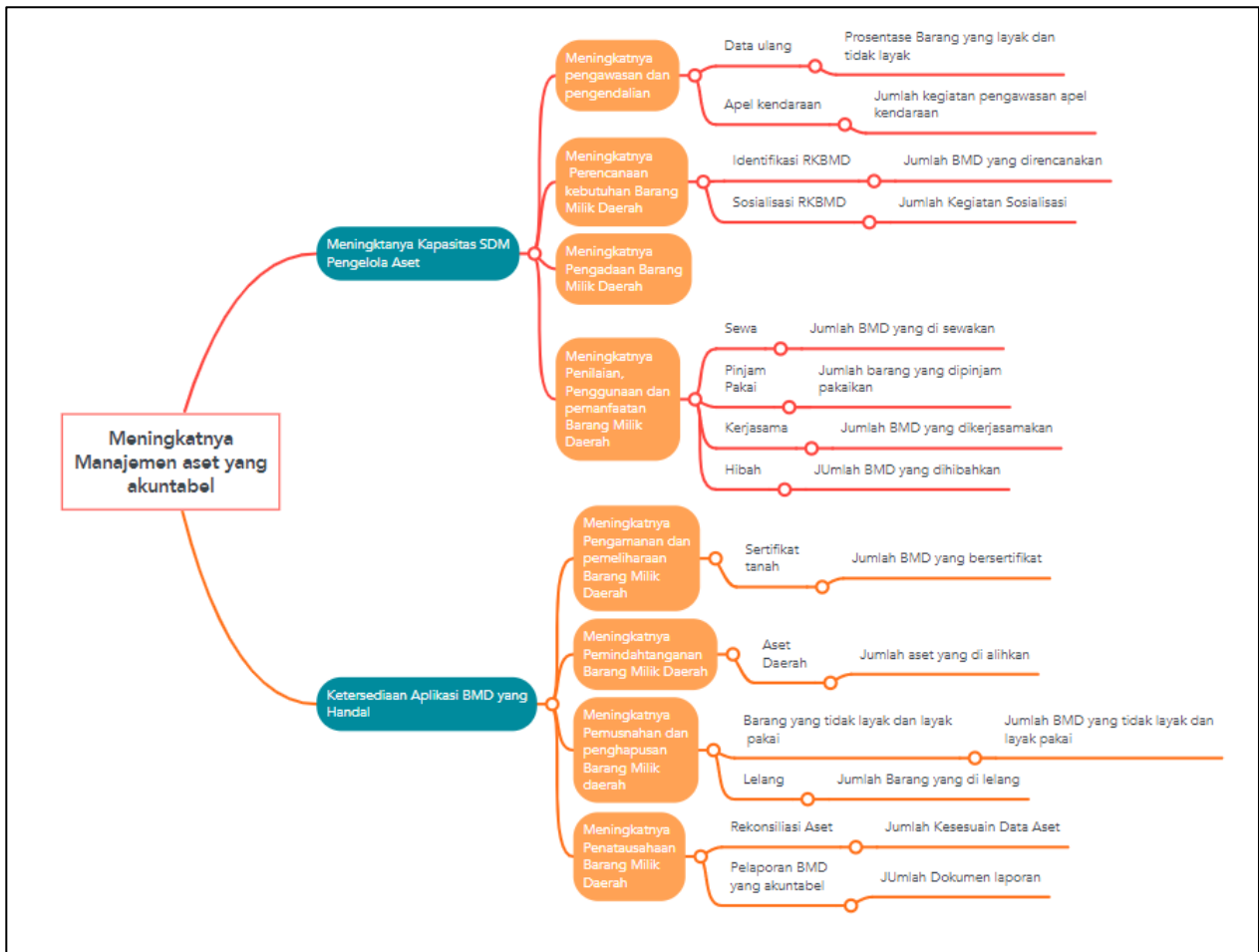
Tujuan / Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Sasaran Utama	Indikator Sasaran	Target			Formula / Penjelasan
				2024	2025	2026	
Tujuan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			70	72	73	Kriteria: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Indeks Pengelolaan Aset			85	90	95	1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif a. hasil pemeriksaan BPK atas LKPD $\frac{\text{jumlah temuan tidak terkait BMD}}{\text{jumlah temuan pada LKPD oleh BPK}} \times 50\%$ b. Realisasi pendapatan dari pengelolaan aset $\frac{\text{jumlah pendapatan dari pengelolaan aset}}{\text{Nilai produktif aset yang dikelola}} \times 50\%$ 2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan perundangan a. Ketepatan waktu penyampaian laporan perencanaan $\frac{\text{jumlah laporan yang tepat waktu}}{\text{jumlah laporan secara keseluruhan}} \times 50\%$ b. Asuransi BMD $\frac{\text{jumlah BMD yang akan diasuransikan}}{\text{jumlah BMD yang diasuransikan}} \times 50\%$ 3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif a. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMD $\frac{\text{tindak lanjut temuan BPK terkait BMD}}{\text{total temuan BPK terkait BMD}} \times 50\%$

							<p>b. tindak lanjut pengelolaan BMD $\frac{\text{BMD yang dikelola berkelanjutan}}{\text{total BMD non persediaan}} \times 50\%$</p> <p>4. Administrasi BMD yang handal</p> <p>a. persentase BMD yang memiliki dokumen kepemilikan $\frac{\text{Jumlah BMD yang memiliki dokumen kepemilikan}}{\text{jumlah BMD keseluruhan}} \times 50\%$</p> <p>b. penggunaan BMD yang sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah penggunaan BMD sesuai ketentuan}}{\text{jumlah penggunaan BMD keseluruhan}} \times 50\%$</p>
	Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah			20,65	21,65	22,5	$\frac{\text{jumlah PAD}}{\text{jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$
		Sasaran Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah	Porsentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.	90%	95%	100%	<p>1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD $\frac{\text{dokumen perencanaan dan penganggaran yang sesuai}}{\text{jumlah dokumen penganggaran SKPD keseluruhan}} \times 50\%$</p> <p>2. Ketepatan prosedur tahapan penyusunan dokumen anggaran $\frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran yang sesuai prosedur}}{\text{jumlah dokumen penganggaran secara keseluruhan}} \times 50\%$</p>
		Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah	Porsentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu	95%	97%	100%	$\frac{\text{jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dan selesai tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)}}{\text{jumlah laporan keuangan SKPD keseluruhan}} \times 100\%$

		Meningkatnya Manajemen aset yang akuntabel	Prosentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan	96%	98%	100%	<p>1. Pembuatan laporan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah laporan perencanaan aset yang tepat waktu}}{\text{jumlah laporan perencanaan aset secara keseluruhan}} \times 50\%$</p> <p>2. Tindak lanjut pengelolaan aset $\frac{\text{Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan aset berkelanjutan}}{\text{jumlah SKPD secara keseluruhan}} \times 50\%$</p>
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase peningkatan PAD	3.5%	3.75%	4%	$\frac{(\text{jumlah PAD tahun } n) - (\text{Jumlah PAD 2022})}{\text{jumlah PAD tahun 2022}} \times 100$
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	SAKIP	83.5	84	84.5	LHE Nilai Sakip

Gambar 4.1 Logical Framework Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

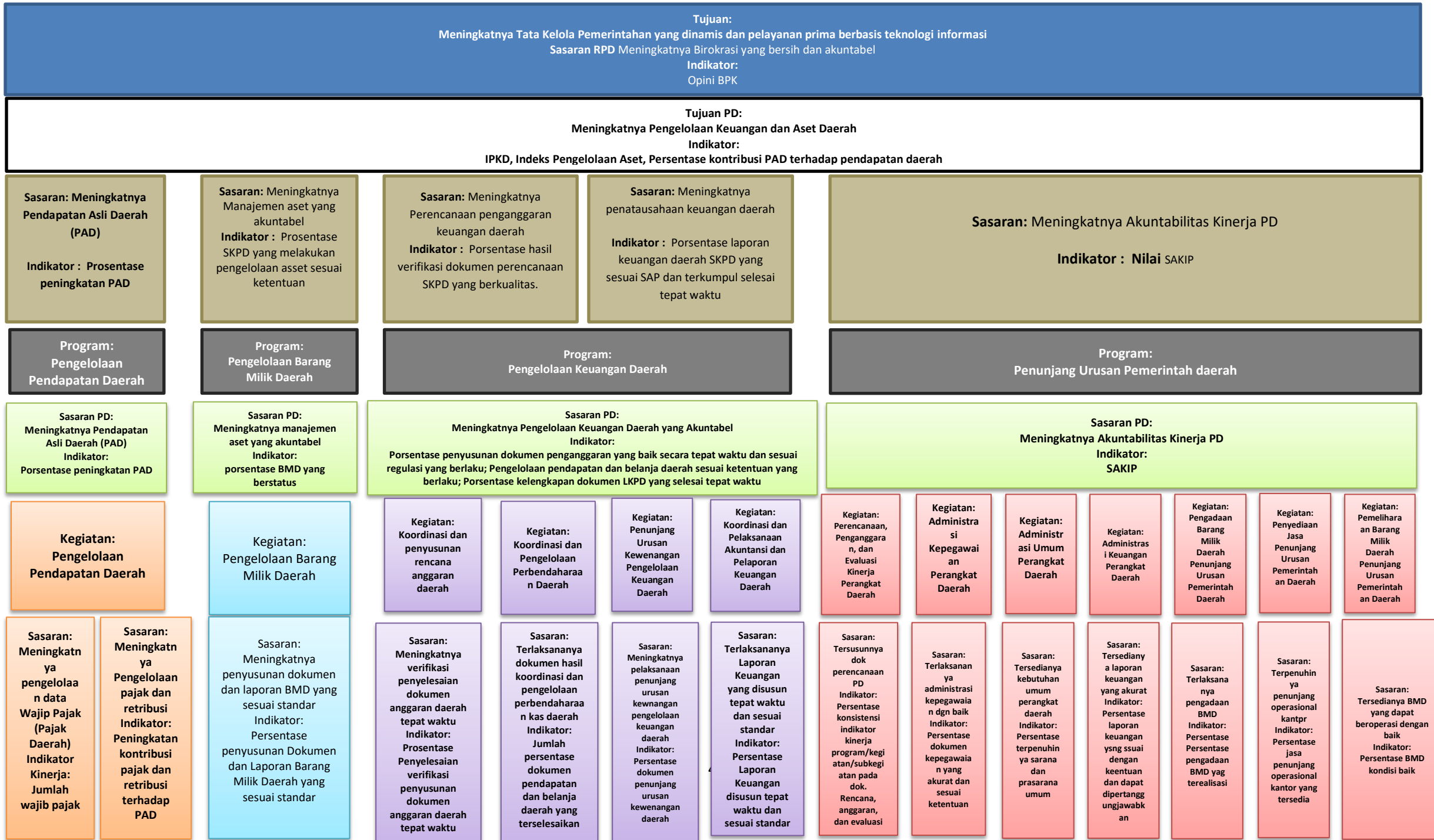




4.2 Cascading

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyesuaian target-target kepada unit-unit kerja. Penjabaran tersebut menjelaskan target pada seluruh level dalam organisasi. Cascading juga sebagai acuan ukuran kinerja yang akan digunakan dalam menetapkan dokumen terkait kinerja. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan, cascading menampilkan penjabaran sasaran beserta indikatornya pada tiap level organisasi. Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 4.2 Cascading Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan



Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhi jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator

Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-OPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-OPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator

Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
 Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Sub Kegiatan/ Sasaran/ Indikator
 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Sub Kegiatan		Sasaran	Indikator
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 3 Tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Tabel T-C.26.					
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan					
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Ketepatan pelaksanaan penganggaran, tertib tata kelola pendapatan dan belanja daerah serta penyampaian LKPD tepat waktu	Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Penganggaran	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi
				Peningkatan Pelaksanaan Fungsi	

				Perbendaharaan	
				Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Gaji	
				Peningkatan kualitas sistem dan prosedur akuntansi	
				Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah	
				Peningkatan Pelaksanaan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	Peningkatan kualitas data Wajib Pajak	Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi
				Peningkatan Sistem penetapan dan perhitungan pajak daerah	
				Peningkatan sistem pelaporan pendapatan daerah	
				Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek pajak daerah	
				Evaluasi dan revisi peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi	
				Peningkatan sosialisasi sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi	

	Indeks Pengelolaan Aset	Meningkatnya Manajemen Aset yang Akuntabel	Porsentase BMD yang berstatus	Peningkatan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah
				Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	
				Peningkatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)	
				Peningkatan Koordinasi serta pelayanan Internal di BPKPD	
				Pemaksimalan penggunaan Aplikasi SIDIA	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP		

➤ Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Lapak Santri: Laporan Pajak Secara Mandiri dengan Transaksi Non Tunai

➤ Manfaat

1. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak daerah secara mandiri dengan menggunakan gadget/ perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan sambungan internet;
2. Pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri dapat mengurangi interaksi Wajib Pajak dengan petugas. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen BPKPD dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

3. Dapat meminimalisir keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak daerah karena wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan yang cukup luas meliputi 24 kecamatan;
4. Dengan penerapan transaksi non tunai dapat meminimalisir resiko *human eror* dalam pencatatan data penerimaan pajak daerah, sehingga akan tercipta laporan pendapatan uang akuntabel.

2. SIDIA: Sistem Informasi Persediaan Pasuruan

SIDIA merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang dari barang tersebut masuk hingga barang tersebut keluar. Dengan adanya SIDIA maka pengelolaan data barang yang sebelumnya masih manual akan menjadi digital, sehingga akan mempermudah dalam melakukan manajemen data karena data lebih terorganisir dan menjadi satu data.

- Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur yang menjadi Prioritas pembangunan Pada tahun 2024-2026. BPKPD dalam mendukung pencapaian arah kebijakan Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2024, melalui program prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan, Program Pengelolaan Pendapatan dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. SIP-TRANSPARAN

SIP-TRANSPARAN merupakan singkatan dari Sistem Informasi Perekaman Transaksi Pajak Daerah secara Elektronik. Program ini merupakan inovasi dari program mandatori dari MCP KPK-RI, yakni pemasangan alat rekam Pajak Daerah di lokasi usaha Wajib Pajak. Hingga akhir Tahun 2022, telah terpasang alat rekam Pajak Daerah di 160 titik objek pajak. Program ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam kepada Wajib Pajak. Target pemasangan alat rekam adalah Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. Pada akhirnya, angka yang dihasilkan dari perekaman tersebut akan disandingkan dengan laporan SPTPD Wajib Pajak. Penyandingan data tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data yang dilaporkan Wajib Pajak dengan data transaksi sebenarnya yang dihasilkan dari alat rekam Pajak Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Tabel. 6.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	2024		2025		2026	
							Target Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	02				KEUANGAN		687.877.349.847		759.814.926.323		759.648.926.323	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	95%	15.000.0000.000	97%	15.000.000.000	100%	15.000.000.000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subk kegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	97%	104.900.040	100%	104.900.040	100%	104.900.040

5	02	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	58.563.120	12 Dokumen	58.563.120	12 Dokumen	58.563.120
5	02	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	46.336.920	2 Laporan	46.336.920	2 Laporan	46.336.920
5	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan ysng ssuai dengan keentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	98%	13.902.310.0 82	100%	13.902.310 082	100%	13.902.310.08 2
5	02	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/b ulan	13.485.887.6 42	98 Orang/bul an	13.485.887.64 2	98 Orang/bu lan	13.485.887.64 2
5	02	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	416.422.440	75 Dokumen	416.422.440	75 Dokumen	416.422.440
5	02	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	103.852.088	100%	103.852.088	100%	103.852.088

5	02	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	103.852.088	160 Orang	103.852.088	160 Orang	103.852.088
5	02	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	231.583.905	100%	231.583.905	100%	231.583.905
5	02	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.236.821	20 Paket	9.236.821	20 Paket	9.236.821
5	02	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	26.015.695	30 Paket	26.015.695	30 Paket	26.015.695
5	02	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	78.393.309	50 Paket	78.393.309	50 Paket	78.393.309
5	02	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	16.266.228	50 Paket	16.266.228	50 Paket	16.266.228

5	02	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.915.695	20 Paket	18.915.695	20 Paket	18.915.695
5	02	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	7.471.170	25 Laporan	7.471.170	25 Laporan	7.471.170
5	02	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	75.284.987	180 Laporan	75.284.987	180 Laporan	75.284.987
5	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	228.350.656 6	100%	235.529.029	100%	235.529.029
5	02	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	63.000.000	1 Unit	63.000.000	1 Unit	63.000.000
5	02	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	118.821.627	4 Unit	126.000.000	4 Unit	126.000.000
5	02	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	18.782.499	20 Unit	18.782.499	20 Unit	18.782.499

					Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	7.746.530	20 Unit	7.746.530	20 Unit	7.746.530
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	umlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	20.000.000	10 unit	20.000.000	10 unit	20.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	82.277.812	98%	82.277.81	98%	82.277.81
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	94.500	5 Laporan	94.500	5 Laporan	94.500
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	49.584.812	30 Laporan	49.584.812	30 Laporan	49.584.812
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	598.500	10 Laporan	598.500	10 Laporan	598.500
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	32.000.000	50 Laporan	32.000.000	50 Laporan	32.000.000

5	02	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	346.725.417	100%	339.547.044	100%	339.547.044
5	02	01	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	25 unit	16.892.720	25 unit	17.737.356	25 unit	17.737.356
5	02	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	142.949.040	80 Unit	150.096.492	80 Unit	150.096.492
5	02	01	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.040.000	20 Unit	5.040.000	20 Unit	5.040.000
5	02	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	40.000.000	100 Unit	42.000.000	100 Unit	42.000.000
5	02	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	141.843.657	5 unit	124.673.196	5 unit	124.673.196

5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku 2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku 3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	1. 95% 2. 100% 3. 100%	667.386.190. 421	1. 97% 2. 100% 3. 100%	738.108.926. 323	1. 100% 2. 100% 3. 100%	738.232.926. 323
5	02	02	2. 01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	2.642.106.9 01	100%	5.795.249.43 0	100%	6.374.774.20 0
5	02	02	2.0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	322.378.196	4 Dokumen	707.110.698	4 Dokumen	777.821.600

5	02	02	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	237.775.730	4 Dokumen	521.541.978	4 Dokumen	573.696.170
5	02	02	2.0 1	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	140.450.090	60 Dokumen	308.066.000	60 Dokumen	338.872.600
5	02	02	2.0 1	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	158.856.945	60 Dokumen	348.439.960	60 Dokumen	383.283.950
5	02	02	2.0 1	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.170.698.48 5	2 Dokumen	2.567.833.166	2 Dokumen	2.824.616.490
5	02	02	2.0 1	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	260.786.072	2 Dokumen	572.013.318	2 Dokumen	629.214.650
5	02	02	2.0 1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	140.419.980	2 Dokumen	307.999.956	2 Dokumen	338.799.950

5	02	02	2.0 1	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	210.741.403	100 Orang	462.244.354	100 Orang	508.468.790
5	02	02	2.0 02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	1.594.397.5 92	100%	3.179.257.41 0	100%	3.179.257.41 0
5	02	02	2.0 2	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	297.330.673	12 Dokumen	592.882.698	12 Dokumen	592.882.698
5	02	02	2.0 2	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	945.150.828	50 Dokumen	1.884.647.712	50 Dokumen	1.884.647.712

5	02	02	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	52.906.746	2 Laporan	105.497.000	2 Laporan	105.497.000
---	----	----	----------	----	---	---	--------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------

5	02	02	2.0 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	45.019.655	268 Dokumen	89.770.000	268 Dokumen	89.770.000
5	02	02	2.0 2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	60.159.940	1 Dokumen	119.960.000	1 Dokumen	119.960.000
5	02	02	2.0 2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	193.829.750	100 Orang	386.500.000	100 Orang	386.500.000

5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.076.428.836	100%	2.146.418.416	100%	2.146.418.416
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	114.456.390	12 Laporan	228.228.096	12 Laporan	228.228.096
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	117.004.805	4 Dokumen	233.309.680	4 Dokumen	233.309.680
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	277,831.978	7 Laporan	554.001.950	7 Laporan	554.001.950

5	02	02	2.0 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	248.134.527	4 Dokumen	494.784.700	4 Dokumen	494.784.700
5	02	02	2.0 3	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	67.030.309	4 Dokumen	133.569.640	4 Dokumen	133.659.640

5	02	02	2.0 3	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	55.652.960	1 Dokumen	110.973.000	1 Dokumen	110.973.000
5	02	02	2.0 3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	196.317.867	57 Orang	391.461.350	57 Orang	391.461.350
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daeran	100%	662.073.257.092	100%	726.988.001.067	100%	726.532.476.297
5	02	02	2.0 4	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	348.331.003	2 Laporan	647.210.668	2 Laporan	647.210.668

5	02	02	2.0 4	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	576.269.446. 783	7 Laporan	601.557.238.4 30	7 Laporan	602.492.713.6 61
5	02	02	2.0 4	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	38.307.250.3 16	10 Laporan	77.776.344.60 1	10 Laporan	76.385.344.60 0
5	02	02	2.0 4	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	47.148.228.9 90	3 Laporan	47.007.207.36 8	3 Laporan	47,007,207,36 8
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	785.192.478	100%	1.391.000.00 0	100%	1.046.000.00 0
5	02	03	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	785.192.478	100%	1.391.000.000	100%	1.046.000.000
5	02	03	2.0 1	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	19.304.988	112 Dokumen	35.392.480	112 Dokumen	25.739.985

5	02	03	2.0 1	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	33.000.000	12 Dokumen	24.000,000
5	02	03	2.0 1	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	149.757.309	4 Laporan	274.754.271	4 Laporan	208.147.175
5	02	03	2.0 1	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	474.339.865	500 Laporan	823.853.449	500 Laporan	619.616.282
5	02	03	2.0 1	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	30.400.000	12 Laporan	52.800.000	12 Laporan	40.000,000
5	02	03	2.0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	57.173.388	226 Dokumen	104.817.877	226 Dokumen	79.407.483

5	02	03	2.0 1	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	16.583.086	4 Laporan	30.386.546	4 Laporan	21.819.850
5	02	03	2.0 1	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	19.633.842	4 Laporan	35.995.377	4 Laporan	27.269.225
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	1,5%	4.705.966.948	2,00%	5.315.000.000	2,20%	5.370.000.000
5	02	04	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Wajib Pajak 2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1. 150 2. 1%	4.705.966.948	1, 250 2, 1,5%	5.315.000.000	1, 300 2, 2%	5.370.000.000
5	02	04	2.0 1	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	47.599.993	2 Dokumen	48.999.993	2 Dokumen	41.999.994

5	02	04	2.0 1	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	187.240.386	20 Dokumen	212.022.202	15 Dokumen	218.079.979
5	02	04	2.0 1	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	204.016.633	8 Laporan	231.018.834	8 Laporan	237.619.372
5	02	04	2.0 1	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.128.689.84 0	12 Laporan	1.245.629.305	12 Laporan	1.097.983.200
5	02	04	2.0 1	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	145.595.045	12 Laporan	175.759.459	12 Laporan	164.466.216

5	02	04	2.0 1	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7.868 Obyek Pajak	784.503.315	8,262 Obyek Pajak	1.010.650.568	8,675 Obyek Pajak	992.208.807
5	02	04	2.0 1	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	918.744 Dokumen	581.431.783	1,007,902 Dokumen	615.633.653	1,105,841 Dokumen	725.268.461
5	02	04	2.0 1	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	65.698.540	2 Layanan	76.519.800	2 Layanan	81.798.500
5	02	04	2.0 1	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	385.956.287	12 Laporan	480.659.598	12 Laporan	537.307.943
5	02	04	2.0 1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8990 Dokumen	636.739.885	9100 Dokumen	664.225.768	9150 Dokumen	645.775.052
5	02	04	2.0 1	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11	24.499.976	11	25.199.975	11	24.499.976

5	02	04	2.0 1	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	53 Dokumen	454.775.090	55 Dokumen	467.768.664	63 Dokumen	542.500.000
5	02	04	2.0 1	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	59.220.175	2 Laporan	60.912.180	2 Laporan	60.392.5000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83	83.5	84	84.5	84.5
2	Laporan Keuangan dengan opini WTP	2 laporan				
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		70	72	73	73
4	Indeks Pengelolaan Aset		85	90	95	95
5	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		20,65	21,65	22,5	22,5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	
	Porsentase hasil verifikasi dokumen penganggaran SKPD yang berkualitas		90%	95%	100%	100%
	Porsentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu		95%	97%	100%	100%
	Prosentase SKPD yang melakukan pengelolaan asset sesuai ketentuan		96%	98%	100%	100%
	Prosentase peningkatan PAD		3.5%	3.75%	4%	4%

7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Data setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. IKK tersebut digunakan dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang keuangan dan pendapatan. Sehubungan dengan tugas yang diampunya, BPKPD

memegang Indikator Kinerja Kunci dalam urusan perencanaan dan keuangan serta dalam urusan manajemen keuangan.

Tabel 7.2 Proyeksi Target Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN 2022	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (PROYEKSI 2023)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
02.04.01	UNSUR KEUANGAN						
2.4.1.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8,3649%	8,3649%	9,17%	9,26%	9,38%	9,38%
2.4.1.2	Rasio PAD	22,4192%	22,4192%	20,04%	20,23%	20,48%	20,48%
2.4.1.5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure)	86,8225%	86,8225%	77,08%	77,34%	78,99%	78,99%
2.4.1.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
02.04.04	Manajemen Keuangan						
2.4.4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,35%	-5,35%	-7,85%	-7,50%	-8,06%	-8,06%
2.4.4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9,76%	9,76%	1,50%	1,85%	2,25%	2,25%
2.4.4.3	Manajemen Aset	2731023	2731023	2790105	2851487	2914219	2914219
	Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.4.4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,87%	9,87%	1,98%	2,14%	2,12%	2,12%

*Berdasarkan data sementara

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024-206 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam periode tiga tahun yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Disamping itu, juga sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan ukuran kinerja yang telah dicapai dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selain menjadi pedoman, diharapkan Renstra ini mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam tiga tahun serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, sehingga mampu memberikan hasil capaian kinerja yang optimal. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi peningkatan dan pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan mendatang.

Pasuruan, 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PASURUAN



Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196602140986021003



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan